

**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

TAHUN 2026

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP.

Selanjutnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11));
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagian acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2026.

1.4.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN LALU

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan Penetapan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2024, dan Capaian Analisis Kinerja sampai dengan indikator kinerja kegiatan triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) hingga Triwulan IV dengan seksama. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Inspektorat Daerah, serta untuk memastikan bahwa arah strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat Daerah masih sesuai dan relevan.

Dalam proses evaluasi ini, Inspektorat Daerah mengumpulkan data terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan selama dua triwulan pertama tahun 2024. Data ini mencakup indikator kinerja, anggaran yang telah digunakan, serta kendala atau hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Renja.

Selain itu, evaluasi ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja, seperti keterbatasan anggaran, serta perubahan kondisi eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, Inspektorat Daerah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan kelancaran pelaksanaan Renja ke depannya.

Hasil capaian kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Inspektorat Daerah
Tahun 2024 Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
					K	Rp Renja	DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
				K	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp
[1] Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan																
	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0.17	3	0.17		0.33		0		0				0	
[2] Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan																
	Nilai IEPK	Nilai	2.925	3	2.91 5		3.01		3		99.67		3		102.56	
[3] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1.385.896.400		1.385.896.400		1.149.312.094		82.95				
	Persentase Keterjadian Kasus Hukum Pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa	%	1		1		1		0		200				200	
	Persentase Peningkatan Temuan Ketidakpatuhan Dalam LHP BPK RI Atas LKPD	%	30		30		30		66.6 7				66.67		200	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan	%	57	69	55		55		75.73		137.69		75.73		132.86	
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	%	95		94		94		96		102.13		96		101.05	
[4] Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.304.583.000		1.304.583.000		1.090.898.324		83.65				
	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Buah	2100	822	700		700		887		126.71		887		42.24	
	Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Buah	450	230	150		150		156		104		156		34.67	
	Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	%	95	94.97	95		95		100		105.26		100		105.26	
[5] Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						395.464.000		395.464.000		366.770.158		92.75				
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	12	4	4		4		5		125		5		41.67	
[5] Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						207.590.000		207.590.000		199.868.400		96.26				
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56	56	56		56		56		100		56		100	
[5] Reviu Laporan Kinerja						121.050.000		121.050.000		4.850.000		4.01				

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	6	3	2		2		2		100		2		33.33	
[5] Reviu Laporan Keuangan						22.416.000		22.416.000		4.425.000		19.74				
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1		1		1		100		1		100	
[5] Pengawasan Desa						316.717.000		316.717.000		301.495.274		95.2				
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	93	41	31		31		31		100		31		33.33	
[5] Kerjasama Pengawasan Internal						30.384.000		30.384.000		9.650.000		31.76				
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepak atan	9	1	3		3		3		100		3		33.33	
[5] Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						210.962.000		210.962.000		203.839.492		96.65				
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokum en	42	2	14		14		14		100		14		33.33	
[4] Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						81.313.400		81.313.400		58.413.770		71.84				

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	%	95	89.47	95		95		100		105.26		100		105.26	
[5] Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						51.812.600		51.812.600		29.433.770		56.81				
	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	3	1	1		1		1		100		1		33.33	
[5] Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						29.500.800		29.500.800		28.980.000		98.23				
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	168	68	56		56		58		103.57		58		34.52	
[3] PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.609.985.500		1.609.985.500		1.272.411.945		79.05				
	Level Kapabilitas APIP	level	3	3	2		3		3		100		3		100	
	Persentase desa berisiko tinggi	%	5		10		10		9.97		100.3		9.97		200	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai reformasi birokrasi pada kategori minimal B	%	52		50		50		N/A		N/A				N/A	
[4] Pendampingan dan Asistensi						1.574.660.500		1.574.660.500		1.243.543.945		78.95				
	Persentase pemerintah desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	10		10		10		35		350		35		350	
	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
[5] Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						120.804.000		120.804.000		97.665.445		80.86				
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	168	91	56		56		56		100		56		33.33	
[5] Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						865.870.000		865.870.000		717.504.510		82.87				

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	168		56		1		1		100		1		0.6	
[5] Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					571.178.500		571.178.500		415.152.254		72.68					
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	13	4		4		6		150		6		50	
[5] Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					16.808.000		16.808.000		13.221.736		78.66					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	165	56	55		55		55		100		55		33.33	
[4] Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					35.325.000		35.325.000		28.868.000		81.73					
	Level Komponen Aktivitas dan Kualitas Pengawasan	level	2	3	2		3		3		100		3		150	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Level komponen dukungan pengawasan	level	2	3	2		3		3		100		3		150
[5] Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						30.555.000		30.555.000		25.218.000	82.53				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekome ndasi	3	1	1		1		1		100		1		33.33
[5] Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan						4.770.000		4.770.000		3.650.000	76.52				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekome ndasi	3	3	1		1		1		100		1		33.33
[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.355.976.61 8		15.355.976.61 8		14.930.697.024	97.17				
	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100
[4] Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.988.000		17.988.000		5.923.300	32.93				

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokum en	3	7	3		3		4		133.33		4		133.33	
[5] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.986.500		9.986.500		4.162.300		41.68				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	2	2	2		2		2		100		2		100	
[5] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.001.500		8.001.500		1.761.000		22.01				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1		1		1		100		1		100	
[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.839.727.96 6		12.839.727.96 6		12.707.379.421		99				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	12	5		5		5		100		5		100	
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.780.467.96 6		12.780.467.96 6		12.648.119.421		98.93				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	78	51	79		79		79		100		79		101.28	
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						59.260.000		59.260.000		59.260.000		100.0 2				

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	7	5	7		7		7		100		7		100
[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah						814.361.142		814.361.142		718.318.456		88.2			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	2	8	2		2		2		100		2		100
[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.805.000		9.805.000		8.700.000		88.73			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	4		4		4		100		4		100
[5] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						121.551.564		121.551.564		78.284.100		64.39			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	4		4		4		100		4		100
[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						46.706.778		46.706.778		42.902.500		91.88			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	5	5		5		5		100		5		100
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor						117.293.000		117.293.000		105.094.500		89.64			

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	5	7		7		7		100		7		100	
[5] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.769.000		25.769.000		13.579.900		52.7				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3	2		2		2		100		2		100	
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						461.840.800		461.840.800		439.127.456		95.09				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	36	30		30		31		103.33		31		103.33	
[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						31.395.000		31.395.000		30.630.000		97.56				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500		500		500		557		111.4		557		111.4	
[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						625.912.500		625.912.500		610.546.400		97.56				
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	10	2		2		2		100		2		100	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
[5] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						508.412.500		508.412.500		493.646.400		97.08				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	60	4		35		44		125.71		44		1100	
[5] Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						117.500.000		117.500.000		116.900.000		99.49				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30	2		100		107		107		107		5350	
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						456.772.120		456.772.120		374.480.973		82.01				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	12	2		2		2		100		2		100	
[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						176.562.000		176.562.000		128.067.140		72.54				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	5	5		5		5		100		5		100	
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						280.210.120		280.210.120		246.413.833		87.92				

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8	8		8		8		100		8		100	
[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						601.214.890		601.214.890		514.048.474		85.46				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	12	3		3		3		100		3		100	
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						257.844.000		257.844.000		238.350.354		92.43				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	45	31		31		38		122.58		38		122.58	
[5] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						61.172.000		61.172.000		43.601.050		71.27				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	52	20		20		28		140		28		140	

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024		Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						282.198.890		282.198.890		232.097.070		82.24				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	1	2		2		3		150		3		150	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- h. Penerbitan keterangan bebas temuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi ke luar Instansi Kabupaten;
- i. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati..

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan;
 2. Kasubag Analisis dan Evaluasi;
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 1. Inspektorat Pembantu I;
 2. Inspektorat Pembantu II,
 3. Inspektorat Pembantu III;
 4. Inspektorat Pembantu IV;
 5. Inspektorat Pembantu V;
- d. Jabatan Fungsional.



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Gambar 2.1.
Bagan Organisasi Inspektorat Daerah

3. Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 diukur dengan dua indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya yaitu Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dengan pelaksanaan program kegiatan tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dapat merealisasikan capaian indikator kinerja utama yang secara rinci dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan Meningkatkan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.	Persentase Peningkatan Nilai IEPK	%	0,33	0,00	0,00	Tidak Tercapai
2.	Persentase Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	%	0,33	1,00	303,03	Tercapai
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Ada Temuan Materiil	%	85,00	92,86	109,25	Tercapai
4.	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani)	%	20,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
Sasaran Optimalnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan						
1.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	indeks	3,01	3,00	99,67	Tidak Tercapai
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	nilai	3,01	3,03	100,66	Tercapai

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Ada Temuan Materiil	%	85,00	92,86	109,25	Tercapai
4.	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)/WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani)	%	20,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai
Rata – Rata Capaian					90,23	

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 adalah sebesar **90,23%**.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Terbatasnya SDM dan anggaran pengawasan sehingga belum dapat menjangkau seluruh obyek pengawasan;
- c. Belum semua OPD menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.1. Tingkat kinerja Inspektorat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat dari terwujudnya APIP yang efektif. Untuk mewujudkan peran tersebut, APIP melakukan suatu aktivitas pengawasan berupa peran dan layanan yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah. Dalam memberikan peran dan layanan, APIP membutuhkan suatu dukungan pengawasan berupa pengelolaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional, adanya praktik-praktik profesional, budaya dan hubungan organisasi yang

dijalinnya, serta didukung dengan struktur tata kelola, dan akuntabilitas manajemen kinerja. Dukungan pengawasan yang handal diharapkan dapat membantu APIP melaksanakan aktivitas pengawasan secara efektif sehingga kualitas pengawasan yang dihasilkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

Dari isu-isu strategis dan gambaran kinerja pelayanan di atas, maka APIP sebagai suatu organisasi perlu didukung dengan struktur tata kelola seperti ketersediaan pendanaan/anggaran dalam melakukan aktivitas pengawasan, akses penuh terhadap informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan hubungan pelaporan formal atas kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. Proses-proses tersebut perlu dituangkan ke dalam akuntabilitas dan manajemen kinerja APIP seperti rencana kerja anggaran APIP, sistem pengelolaan anggaran secara ekonomis dan efisien, Sistem pengukuran kinerja dan pelaporan manajemen APIP terhadap organisasi. Terkait dengan hal tersebut, hal yang menjadi hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah terkait dengan ketersediaan pendanaan/anggaran dan SDM dalam melakukan aktivitas pengawasan.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan isu penting, permasalahan, dan dampak program dan kegiatan Inspektorat Daerah terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas memiliki peluang besar untuk meningkatkan peranannya dalam pengawasan pemerintahan.

Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengacu pada:

a. *Strengths* (Kekuatan)

1. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang cukup memadai. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, Jabatan Fungsional yang sebelumnya berada di bawah Inspektur, saat ini telah berada di bawah Inspektur Pembantu. Hal ini menyederhanakan birokrasi dan mempercepat koordinasi.
2. Cakupan tugas dan fungsi yang luas di antaranya adalah tugas dan fungsi assurance yang meliputi audit, evaluasi, review, dan pemantauan, serta asistensi dan pendampingan;

3. Inspektur Daerah dapat melakukan pemeriksaan tanpa disposisi dari Bupati sehingga penanganan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan lebih cepat;
4. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas Inspektorat Daerah yang ditangani secara khusus sehingga dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

1. Pemanfaatan hasil pengawasan belum optimal;
2. Pengendalian intern oleh OPD belum optimal.
3. Masih belum tersedianya APIP dengan keahlian khusus (Misal : Sarjana Teknik Sipil)

c. *Opportunities* (Peluang)

1. Koordinasi dan dukungan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKP terjalin dengan baik;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan dan penganggarannya;
3. Dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan.

d. *Threats* (Ancaman)

1. Intervensi dalam kegiatan pengawasan;
2. Perubahan kebijakan Pemerintah dan lambatnya pembuatan petunjuk teknis.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Inspektorat sebagai berikut:

Strategi 1: Memanfaatkan peluang dan kekuatan

Optimalisasi kegiatan pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta dukungan dari para pemangku kepentingan.

Strategi 2: Meminimalkan kelemahan dan ancaman

Memenuhi jumlah SDM dengan pengusulan penambahan SDM baik melalui pengadaan CPNS dengan keahlian khusus maupun inpassing, serta optimalisasi pengendalian intern dengan melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan maupun pendampingan, serta minimalisasi intervensi pada kegiatan pengawasan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah yang tercantum di dalam RKPD 2026;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Inspektorat Daerah yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Inspektorat Daerah yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2026.
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat Daerah hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Banyumas**

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun	
					2026					2026	
					Target	Rp				Target	Rp
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	Angka	87,875	17.060.705.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	Angka	87,875	17.060.705.000,00
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	94,500			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	94,500	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%		
			Nilai kematangan organisasi	Angka	50			Nilai kematangan organisasi	Angka	50	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	19.861.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	19.861.000,00
			Persentase kesuaian program renja dengan DPA	%	100			Persentase kesuaian program renja dengan DPA	%	100	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15.751.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15.751.000,00
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4.110.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4.110.000,00
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ)	%	100	13.969.140.845,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ)	%	100	13.969.140.845,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun	
					2026					2026	
					Target	Rp				Target	Rp
			terhadap pengajuan anggaran (NPD)					terhadap pengajuan anggaran (NPD)			
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	
	X.XX.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	78	13.901.160.845,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	78	13.901.160.845,00
	X.XX.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7	67.980.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7	67.980.000,00
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	79	1.051.465.355,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	79	1.051.465.355,00
			Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	73,391			Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	73,391	
	X.XX.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.178.500,00	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.178.500,00
	X.XX.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	142.126.684,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	142.126.684,00
	X.XX.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	35.016.571,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	35.016.571,00
	X.XX.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	138.989.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	138.989.000,00
	X.XX.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	36.132.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	36.132.500,00
	X.XX.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	627.985.600,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	627.985.600,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun	
					2026					2026	
					Target	Rp				Target	Rp
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500	59.036.500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500	59.036.500,00
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	894.155.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	894.155.000,00
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	50			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	50	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	869.155.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	869.155.000,00
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	25.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	25.000.000,00
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	571.398.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	571.398.800,00
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	176.537.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	176.537.600,00
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	394.861.200,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	394.861.200,00
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	554.684.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	554.684.000,00
			Persentase Pemeliharaan Barang	%	100			Persentase Pemeliharaan Barang	%	100	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun	
					2026					2026	
					Target	Rp				Target	Rp
			Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah					Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah			
	X.XX.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	241.444.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	241.444.000,00
	X.XX.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	55.740.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	55.740.000,00
	X.XX.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	257.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	257.500.000,00
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan	%	75	1.347.551.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan	%	75	1.347.551.000,00
			Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	%	95			Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	%	95	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	850	1.166.041.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	850	1.166.041.000,00
			Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	156			Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	156	
			Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	%	100			Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	%	100	
	6.01.02.2.01.000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	295.700.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	295.700.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun	
					2026					2026	
					Target	Rp				Target	Rp
	6.01.02.2.01.000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56	289.650.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56	289.650.000,00
	6.01.02.2.01.000 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	9.246.000,00	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	9.246.000,00
	6.01.02.2.01.000 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	18.930.000,00	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	18.930.000,00
	6.01.02.2.01.000 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	31	248.820.000,00	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	31	248.820.000,00
	6.01.02.2.01.000 6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	52.435.000,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	52.435.000,00
	6.01.02.2.01.000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	14	251.260.000,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	14	251.260.000,00
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi	%	100	181.510.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi	%	100	181.510.000,00
			Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	%	100			Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	%	100	
	6.01.02.2.02.000 1	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	34.810.000,00	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	34.810.000,00
	6.01.02.2.02.000 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	56	146.700.000,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	56	146.700.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun	
					2026					2026	
					Target	Rp				Target	Rp
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	%	1	4.898.095.000,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	%	1	4.898.095.000,00
			Persentase OPD yang memperoleh predikat ZI	%	1			Persentase OPD yang memperoleh predikat ZI	%	1	
			Persentase OPD yang memperoleh Nilai SAKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal minimal 22,5	%				Persentase OPD yang memperoleh Nilai SAKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal minimal 22,5	%		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang memiliki Petunjuk Teknis	%	20	8.220.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang memiliki Petunjuk Teknis	%	20	8.220.000,00
	6.01.03.2.01.000 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendas i	1	4.110.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendas i	1	4.110.000,00
	6.01.03.2.01.000 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendas i	1	4.110.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendas i	1	4.110.000,00
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Auditee yang mendapatkan Pembinaan dan Asistensi	%		4.889.875.000,00	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Auditee yang mendapatkan Pembinaan dan Asistensi	%		4.889.875.000,00
	6.01.03.2.02.000 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	56	1.233.845.000,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	56	1.233.845.000,00
	6.01.03.2.02.000 2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	56	1.783.540.000,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	56	1.783.540.000,00

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun	
					2026					2026	
					Target	Rp				Target	Rp
	6.01.03.2.02.000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	801.980.000,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	801.980.000,00
	6.01.03.2.02.000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	55	1.070.510.000,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	55	1.070.510.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Usulan tersebut ditelaah oleh Sub Koordinator Perencanaan di Inspektorat Daerah dan kemudian diteruskan kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas terkait untuk diusulkan melalui forum dan Musrenbang Kabupaten. Hasil dari telaahan usulan masyarakat oleh Sub Koordinator Perencanaan Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat substansi yang terkait dengan program/kegiatan di Inspektorat Daerah.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai

lumbung pangan nasional”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: “*Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.*” Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk “*Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya*

dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif". Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda
- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran
- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal
- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan
- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. Inspektorat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *"Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera."* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;

- Memperkuat ketahanan pangan;
- Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
- Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Inspektorat Daerah Kab. Banyumas Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Optimalnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan:
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
TOTAL						23.306.351.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Integritas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			1. Indek Efektivitas Pengendalian (IEPK) 2. Nilai Kapabilitas APIP 3. Nilai MCSP pada area penguatan APIP	Angka Angka Nilai	3,005 3,030 85		3,015 3,040 89	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka Angka Angka	88,500 3,530 3,830		90 3,540 3,870	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	Angka	87,875	17.060.705.000,00	88	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	94,500		94,800	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%				
			Nilai kematangan organisasi	Angka	50		50	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	100	19.861.000,00	100	
			Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	%	100		100	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	15.751.000,00	2	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4.110.000,00	1	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	13.969.140.845,00	100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100		100	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	78	13.901.160.845,00	78	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	7	67.980.000,00	7	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	79	1.051.465.355,00	79	
			Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	73,391		73,392	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.178.500,00	4	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	142.126.684,00	4	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	35.016.571,00	5	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	138.989.000,00	7	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket	2	36.132.500,00	2	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
			Penggandaan yang Disediakan					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	627.985.600,00	30	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500	59.036.500,00	500	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	894.155.000,00	100	
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	50		50	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	869.155.000,00	4	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	25.000.000,00	2	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	571.398.800,00	100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	176.537.600,00	5	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	394.861.200,00	8	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	554.684.000,00	100	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	241.444.000,00	38	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	55.740.000,00	28	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	257.500.000,00	3	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
	Optimalnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan		1. Nilai SAKIP Pemkab pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 2. Nilai Kapabilitas APIP pada elemen Peran dan Layanan 3. Persentase Parameter IEPK yang mendapat grade B	Angka Nilai %	18,180 3 5		18,200 3 8	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP APIP yang diselesaikan	%	75	1.347.551.000,00	75	
			Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan TLHP BPK RI yang diselesaikan	%	95		95	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	850	1.166.041.000,00	850	
			Jumlah rekomendasi pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	156		156	
			Persentase penugasan pengawasan berdasarkan PKPT berbasis risiko	%	100		100	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	295.700.000,00	4	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56	289.650.000,00	56	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	9.246.000,00	2	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	18.930.000,00	1	
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	31	248.820.000,00	31	
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	52.435.000,00	3	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	14	251.260.000,00	14	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi	%	100	181.510.000,00	100	
			Persentase penugasan pengawasan dengan tujuan tertentu berdasarkan mandatori	%	100		100	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian	Laporan	1	34.810.000,00	1	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
			Negara/Daerah yang Ditangani					
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	56	146.700.000,00	56	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	%	1	4.898.095.000,00	1	
			Persentase OPD yang memperoleh predikat ZI	%	1		1	
			Persentase OPD yang memperoleh Nilai SAKIP komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal minimal 22,5	%				
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang memiliki Petunjuk Teknis	%	20	8.220.000,00	50	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	4.110.000,00	1	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	4.110.000,00	1	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tahun		Target Akhir	
					2026		Renstra	
					Target	Rp	Target	Rp
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Auditee yang mendapatkan Pembinaan dan Asistensi	%		4.889.875.000,00		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	56	1.233.845.000,00	56	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	56	1.783.540.000,00	56	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	801.980.000,00	4	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	55	1.070.510.000,00	55	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2025– 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2026. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pengawasan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 secara efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026, dimana Renja Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Inspektorat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2026;
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2026 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Renja Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dibuat di Purwokerto

Pada tanggal 19 Agustus 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas



Djoko Setyond, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1970022 199001 1 002